

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Letak geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai sinar matahari yang berkecukupan. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia berada tepat pada garis katulistiwa, yang kemudian menjadi faktor unggul mendukung tumbuh serta berkembangnya Indonesia menjadi negara penghasil garam. Kondisi geografis yang demikian memiliki peluang untuk mengembangkan sektor kelautan pesisir, salah satunya adalah produksi garam dalam skala besar. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat salinitas air laut, yang juga mengandung NaCl (Putri *et al.* 2021).

Garam merupakan kristal putih Natrium Klorida (NaCl) yang dibutuhkan oleh setiap insan manusia (Mustofa, 2016). Kegunaan garam terbagi menjadi menjadi 3 kelompok yaitu; (1) Garam konsumsi (2) Garam pengasinan (3) garam industri (Zakki & Sayyida, 2016). Douglas dalam Rusiyanto *Et al.*, (2013) menjelaskan kegunaan natrium klorida selain untuk konsumsi juga banyak diperuntukkan sebagai bahan dasar (*starting material*) untuk berbagai kebutuhan industri, baik industri tekstil dan sebagainya.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 58/M-DAG/PER/9/2012 menyebutkan bahwa baik kualitas maupun jumlah produksi garam dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan garam, terutama untuk keperluan industri. Oleh karena itu, impor garam masih diperlukan (Safrida, 2021). Amat disayangkan bahwa produksi garam di Indonesia hanya untuk kebutuhan bahan konsumsi rumah tangga. Berikut neraca garam Indonesia:

Tabel 1. 1 Neraca Garam Nasional 2019-2023

Tahun	Angka Kebutuhan Garam Nasional (ton)	Produksi Garam (ton)	Impor Garam
2019	4.162.502	2.491.005	2.595.294
2020	4.464.670	1.049.867	2.608.021
2021	4.671.700	873.137	2.831.082
2022	4.443.133	627.022	2.756.626
2023	5.005.317	2.203.137	2.807.857

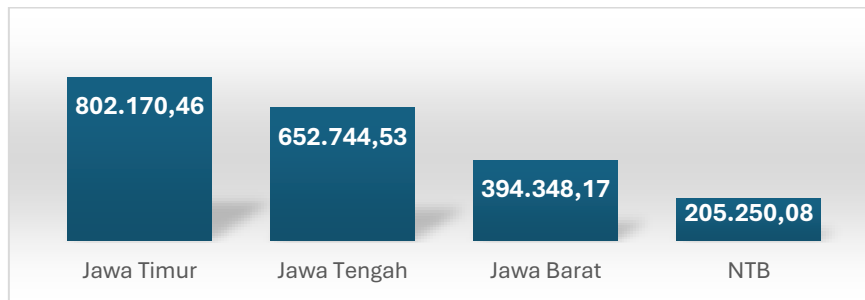
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Rerata masa produksi berkisar selama 4-6 bulan dan hanya pada musim kemarau. Proses pembuatan garam biasanya dilakukan mulai awal bulan Juli-November (Asmiana *et al.*, 2022). Oleh sebab itu, maka tingkat produktivitas dan kualitas garam yang dihasilkan masih belum tinggi, sementara sektor industri pengguna garam bertumbuh dan massif berkembang. Dengan demikian, maka timbulnya kesenjangan antara produksi dan kebutuhan garam. Untuk mencukupi *gap* antara kebutuhan dan kapasitas produksi garam nasional. Maka pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan importasi garam dari beberapa negara yang jumlahnya dari tahun ketahun lebih dari 2 juta ton pertahunnya (Tabel 1.1).

Kebutuhan garam nasional dalam skala 5 tahun rata-rata berkisar 4.583.910 juta sedangkan rata-rata produksi garam nasional hanya mampu menghasilkan 2.347.07 juta. Angka kebutuhan garam nasional per tahunnya mengalami tren kenaikan. Hal ini bertolak belakang dengan kemampuan produksi garam yang cenderung fluaktif dan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Seyogyanya dengan bentang garis laut yang ada di Indonesia, menjadikan komoditas ini sebagai potensi primadona. Alih-alih demikian, potensi garam di Indonesia hanya mampu mengakomodir kebutuhan konsumsi, sedangkan kebutuhan yang paling dominan ialah sektor industri.

Importasi garam pada negara Indonesia bermula pada tahun 1990 dengan volume sebesar 349.042 ton. Kala itu terjadi kelangkaan cuaca yang disebabkan oleh anomali cuaca di Indonesia yang kurang mendukung sehingga aktivitas importasi garam diberlakukan, akan tetapi volume impor garam dari tahun ke tahun terus meningkat sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan seharusnya (Hakim & Triyanti, 2020). Dalam (Tabel 1.1) menunjukkan kelebihan garam yang diterima di Indonesia. Seperti yang terjadi di tahun 2023 kebutuhan garam sejumlah 5.005.317 ton, total produksi garam nasional mencapai 2.203.137 ton, akan tetapi volume impor cukup tinggi sejumlah 2.807.857 ton. Sehingga pada tahun tersebut dari aktivitas niaga garam menyisakan 5.677 ton.

Permasalahan impor bermula karena baku mutu kualitas garam lokal kurang mampu bersaing dengan garam luar. Bukan tanpa sebab, kandungan NaCl pada garam lokal tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, sehingga banyak garam rakyat hanya dimanfaatkan sebagai garam konsumsi. Sejalan dengan penelitian Susilowati *et al.*, (2023) produksi garam rakyat saat ini kurangnya kualitas serta kuantitas kebutuhan garam nasional, teknis produksi yang digunakan masih melalui proses tradisional dilakukan dengan menguapkan air laut di petak penggaraman menggunakan sinar matahari, tanpa teknologi, sehingga meskipun bahan baku melimpah, kadar dan polutan terlarut bervariasi.



Gambar 1. 1 Produksi Garam per Provinsi

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2024

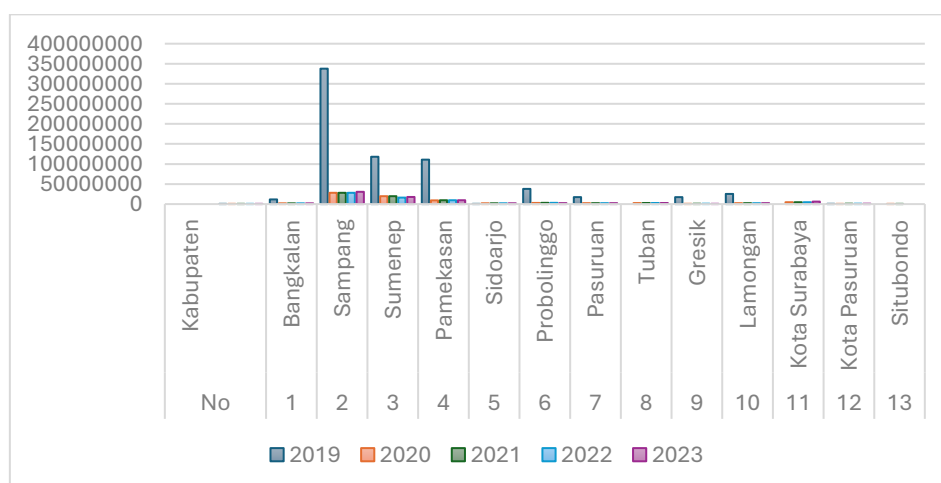
Sumbangsih garam provinsi pada lumbung garam nasional menjadi instrumen penting. Sektor produksi garam rakyat menempati posisi terbesar, sedangkan selebihnya merupakan produksi dari perusahaan swasta nasional. Walaupun demikian daya saing serta pemenuhan kebutuhan garam masih kalah dengan impor. Provinsi Jawa Timur menyumbangkan produksi garam terbesar dengan total 802 ton, kemudian provinsi Jawa Tengah sejumlah 652 ton dan disusul Jawa Barat sejumlah 394 ton, terakhir adalah provinsi NTB berjumlah 205 ton. Dengan demikian, jumlah tertinggi diduduki provinsi Jawa Timur, menunjukkan kondisi geografis Jawa Timur memiliki potensi yang baik untuk memproduksi dan mengolah komoditas garam.

Aspek penting dalam produksi garam ialah kondisi geografis, iklim dan cuaca. Setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda tentunya, hal ini berpengaruh pada pengelolaan tambak garam. Pertama, curah hujan merupakan salah satu faktor krusial yang mempengaruhi situasi tambak garam. Jika curah hujan di suatu daerah tersebut tinggi, maka akan berdampak besar pada skala keberhasilan produksi garam. Produksi-garam dapat dilakukan jika curah hujan rata-rata wilayah tersebut di bawah 10mm, sehingga tidak semua daerah cocok dalam pengaplikasian kegiatan ini. Kedua, produksi garam sangat bergantung pada sinar matahari. Proses ini memerlukan sinar matahari sebagai energi alternatif alami untuk penguapan, yang membutuhkan

sekitar 8 jam sinar matahari setiap hari. Ketiga, jenis tanah merupakan faktor geografis yang penting untuk diperhatikan dalam proses produksi tambak garam karena tanah berperan sebagai media pengendapan garam (Ngongo *et al.*, 2022).

Lahan merupakan modal awal dalam pengolahan garam. Tanpa lahan yang memadai, proses produksi garam tidak dapat berjalan dengan optimal. Lahan yang digunakan bisa merupakan milik pribadi, sewa, atau kerjasama antara pemilik modal dan petani pengolah untuk mendapatkan keuntungan (Fatihudin *et al.*, 2022).

Fluktuasi luas lahan tambak garam di Jawa Timur menggambarkan dinamika yang kompleks pada sektor penggaraman. Namun, penurunan yang terjadi juga menjadikan pertanyaan, apakah ini mengindikasikan adanya tantangan dan kendala yang dihadapi oleh petani garam. Kejadian ini disinyalir dari beberapa faktor diantaranya; (1) Faktor Alam (2) Faktor Sosial (3) Faktor Ekonomi. Perubahan tata guna lahan merupakan fenomena yang tidak terelakkan. Perubahan itu tidak lain dipicu oleh dua faktor utama, yaitu faktor alam dan antropogenik (Maulana *et al.* 2016). Selain itu, penurunan ini bisa disebabkan oleh persaingan dengan komoditas lain yang lebih menguntungkan atau faktor regenerasi pengolah yang tidak ada.



Gambar 1. 2 Luas Lahan per Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Rincian Kabupaten atau Kota yang memiliki potensi untuk memproduksi dan mengelola komoditas garam di Jawa Timur di antaranya Kabupaten; Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Gresik, Sidoarjo, Situbondo, Tuban, Pasuruan, Lamongan, Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya. Khusus di Provinsi Jawa Timur, terdapat Kabupaten dengan produksi garam terbesar, yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan.

Dalam teori pilihan rasional James S. Coleman menekankan pada dua aspek utama yaitu aktor dan sumber daya alam. Maka pemaparan luas lahan dan hasil produksi dirasa belum menjelaskan secara rinci keadaan petani garam. Sehingga, perlu dimasukkan jumlah petambak garam selaku aktor dalam produktivitas komoditi garam.

Tabel 1. 2 Tenaga Kerja Tambak Aktif per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja Tambak Garam (per orang)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bangkalan	128	128	139	132	132
2	Sampang	2.021	2.021	2.021	2.007	2.007
3	Sumenep	3.222	1.649	1.735	1.790	1.790
4	Pamekasan	1.247	1.346	1.347	1.039	1.039
5	Sidoarjo	50	70	65	48	48
6	Probolinggo	453	406	406	440	440
7	Pasuruan	206	191	214	203	203
8	Tuban		331	345	193	193
9	Gresik	50	50	65	34	34
10	Lamongan	308	311	297	266	267
11	Kota Surabaya		98	102	209	209
12	Kota Pasuruan	56	56	51	56	56
13	Situbondo		5	5		

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tabel di atas menunjukkan besaran presentase jumlah petambak garam dominan yaitu pada Pulau Madura, di antaranya pada Kabupaten Sampang, Kabupaten

Sumenep, Kabupaten Pamekasan. Kemudian, posisi tertinggi pemasok tenaga kerja tambak garam terbesar se Jawa Timur adalah Kabupaten Sampang dengan total 2.007 orang per tahun 2023. Bermodalkan dari luas lahan serta tenaga kerja yang memadai Pulau Madura menempati pemasok garam terbesar di Jawa Timur, berkontribusi signifikan terhadap produksi garam nasional. Provinsi Jawa Timur berkontribusi sebesar 36% terhadap produksi nasional, sejumlah 79% total produksinya berasal dari Pulau Madura. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Madura merupakan penyumbang utama di Jawa Timur. Di Pulau Madura, Kabupaten Sampang menyumbang 42% dari total produksi garam, hampir setengah dari keseluruhan produksi garam di Madura. Selain itu, Kabupaten Sampang juga berkontribusi 12% terhadap produksi garam nasional dan 33% untuk produksi di Jawa Timur.

Pulau Madura mashyur dengan sebutan pulau garam bermula dari potensi komoditas ini, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan mata pencaharian masyarakatnya sejak zaman dahulu. Aktivitas pembuatan garam yang dilakukan oleh petani garam adalah warisan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya oleh orang tua mereka (Hotimah & Singgih, 2019). Proses pembuatan garam secara tradisional telah membentuk tradisi budaya dan ekonomi masyarakat Madura. Namun, seiring perkembangan zaman, produksi garam lokal dihadapkan pada berbagai tantangan seperti perubahan iklim, permodalan, persaingan dengan garam impor, dan minimnya inovasi teknologi.

Pulau Madura memiliki peluang besar dalam pengolahan garam tidak lain disebabkan kawasan tersebut memiliki topografi dan keadaan iklim yang memadai. Produksi garam di Madura sebagian besar terjadi di garis pantai selatan. Di sepanjang garis pantai, angin muson yang dikombinasikan dengan angin tenggara yang kering

biasanya menghasilkan lebih sedikit hujan atau tidak ada hujan sama sekali (Prastiwi, 2019). Angin ini berasal dari bagian timur Jawa Timur, antara Gunung Semeru dan Gunung Tengger, lalu bergerak melalui Probolinggo dan terus ke utara menuju pantai selatan Madura. Angin tersebut berpengaruh pada keberhasilan pembuatan garam karena dapat memperpendek waktu pengkristalan. Selain faktor ekstrem tersebut, terdapat juga faktor internal, yaitu kadar garam dalam air laut yang memengaruhi kualitas produksi garam (Wisnu, 2019).

Pulau Madura mempunyai tiga kawasan garam yang luas. Kawasan terbesar berada di Kali Anget di Kabupaten Sumenep lainnya terletak dekat Bunder di Pamekasan selanjutnya di Sampang terletak di Krampon (Jonge, 2011, hal.38). Pembuatan garam dapat ditemukan di sepanjang pantai selatan, yang mencakup Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Di sepanjang pantai selatan tersebut berkisar 4.572 empang garam, dimana di lokasi-lokasi tersebut didirikan gudang-gudang garam bernama sesuai dengan nama desa masing-masing. Di Sampang, gudang-gudang garam terletak di daerah Pragung, Dangpandang, Pangarengan, dan Apaan. Sementara itu, di Pamekasan, gudang garam berada di Mangunan dan Capak; dan di Sumenep, terdapat di Marengan, Palebunan, Pinggir Papas, dan Sarokan (Parwoto, 2018). Kabupaten Sampang merupakan suatu wilayah yang terletak di Madura. Kabupaten Sampang adalah salah satu daerah di Pulau Madura yang terkenal dengan produksi garam yang tinggi, terutama dari daerah Pangarengan, Camplong, dan Jerngik, yang telah lama dikenal di pasar lokal maupun regional. Namun, produksi garam di Sampang mengalami fluktuasi yang drastis.

Produksi garam di wilayah ini sebelumnya sangat baik, dalam beberapa tahun terakhir, produksi mengalami fluktuasi akibat harga jual garam yang rendah, di tahun

2019 produksi 307.715,00 ton terjun bebas di tahun 2020 dengan total produksi 174.598,00 ton. Kemudian tahun 2021 turun lagi dengan total 115.280,41 ton, selanjutnya tahun 2022 sejumlah 73.709,53 ton, pada akhir tahun 2023 produksi berjumlah 266.389,70. Kekhawatiran muncul bahwa kondisi ini akan berlanjut dan berdampak lebih lanjut pada penurunan produksi garam di masa mendatang. Wilayah pegaraman rakyat terluas adalah di Kabupaten Sampang (Ihsannudin, 2013). Fluktuasi harga menjadi momok permasalahan yang enggan berkesudahan. Harga garam di Pulau Madura bulan Januari-Februari berkisar Rp1400 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp1200 per Kg lalu turun lagi bulan april Rp1000 per Kg dan pada bulan juli turun menjadi Rp700 per Kg (Rasikin, 2024). Amat disayangkan apabila keberlangsungan produktivitas komoditi garam ini tidak dipertahankan, walaupun banyak permasalahan kompleks yang mengiringi proses produksi petani garam rakyat.

Kabupaten Sampang, dengan kontribusinya yang signifikan, menjadi salah satu daerah strategis dalam produksi garam di Indonesia. Keberadaan sumber daya air laut yang melimpah di wilayah ini luas lahan dan petambak, menjadikan Sampang potensial serta unggul terhadap produksi garam rakyat. Dengan kontribusi 12% terhadap produksi garam nasional, Kabupaten Sampang tidak hanya menyediakan pasokan untuk kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan pasar nasional.

Sampang sebagai daerah produksi garam yang unggul di Indonesia dengan besaran luas lahan tambak, serta banyaknya petani tambak menjadikan Sampang mampu memproduksi garam dengan kalkulasi yang banyak, adapun sebaran luas lahan tambak dan total produksi di Kabupaten Sampang per Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Luas Lahan dan Total Produksi Kabupaten Sampang per Kecamatan

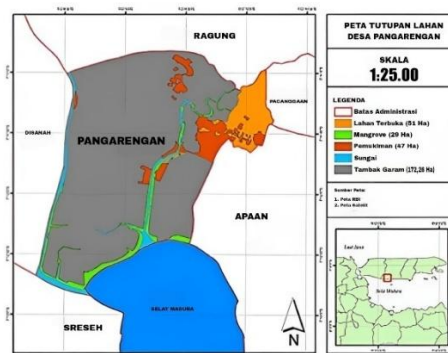
NO	KECAMATAN	Luas Lahan (Ha)	Produksi (ton)
		2022	2022
1	CAMPLONG	43,48	609
2	SAMPANG	547,4	11.864
3	PANGARENGAN	672,017	20.735
4	JRENGIK	183,0646	1.537
5	SRESEH	1.354,56	19.027
6	BANYUATES	13,92	20

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sampang 2023

Kecamatan Pangarengan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani garam rakyat, menjadi pemasok garam tertinggi di Kabupaten Sampang dengan total produksi 20.735 ton pada tahun 2022. Luas lahan tambak garam aktif mencapai 672,017 Ha, menjadikannya sebagai daerah dengan sebaran lahan terbesar kedua. Peningkatan luas lahan terlihat jelas, dari 672,01 Ha pada tahun 2019 menjadi 769,13 Ha pada tahun 2023, menunjukkan produktivitas yang tinggi. Luas tambak garam mempengaruhi tingkat produksi. Dalam konteks ini, semakin besar luas tambak garam maka semakin besar pula dampaknya terhadap produksi petani garam. Dengan kata lain, semakin bertambahnya proporsi luas lahan, maka tingkat produksi pun akan meningkat (Pambudi & Bendesa, 2020).

Kecamatan Pangarengan di Jawa Timur telah lama dikenal sebagai salah satu sentra penghasil garam terbesar di Indonesia. Potensi produksi garam di wilayah ini sangat besar. Namun, di balik potensi yang menjanjikan, sektor pergaraman di Pangarengan juga menghadapi sejumlah tantangan yaitu iklim dan cuaca, permodalan dan daya jual. Senada dengan penelitian Rahman (2024) menyebutkan beberapa tantangan dihadapi petambak garam mulai dari harga garam, iklim dan cuaca, serta garam impor. Lebih lanjut, penelitian (Helmi & Sasaoka, 2018) mengungkapkan bahwa

permasalahan yang dihadapi petani garam Kabupaten Sampang ialah fluktuasi harga, kurangnya modal finansial, curah hujan berlebih, serta perubahan peraturan berkaitan dengan impor garam.



Gambar 1. 3 Gambar Wilayah Desa Pangarengan

Sumber Data RBI, Peta Satelit, Dinas Perikanan dan Perairan dalam penelitian Syah Dkk. (2022)

Wilayah Desa Pangarengan pada (Gambar 1.4) sebagian besar difungsikan sebagai pengolahan garam rakyat. Dikarenakan letak Desa Pangarengan berada pada sisi selatan yang beririsan langsung dengan Selat Madura, kemudian menjadikan kawasan ini melimpah sumberdaya air lautnya. Meskipun begitu, dinamika yang terjadi dalam pengolahan garam hingga sekarang tidak rampung, sedari faktor produksi hingga distribusi.

Kegiatan produksi garam rakyat tidak terlepas dari modal, sebab modal menjadi aspek penting dalam aktivitas faktor produksi. Peran modal sangat krusial karena mampu meningkatkan produksi garam (Pambudi & Bendesa, 2020). Kurangnya modal yang memadai dapat memengaruhi kelancaran usaha, yang pada gilirannya berdampak pada pendapatan yang dihasilkan (Ardika, 2017). Modal fisik mencakup infrastruktur dasar dan peralatan produksi, sementara modal finansial terdiri dari sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung mata pencaharian (Azzahra *et al.*, 2021). Usaha pertanian garam di Madura ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan,

terutama dalam hal mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya (Kurniawan & Gitayuda, 2022). Unit usaha garam menghadapi kendala keuangan yang signifikan, terutama dalam mengakses layanan perbankan. Kegagalan panen akibat perubahan iklim, harga jual garam yang rendah, dan minimnya permintaan pasar menjadi faktor utama yang menghambat kemampuan mereka melunasi utang (Sucipto & Wati, 2023). Harga komoditas pertanian memiliki pengaruh yang signifikan pada berbagai aspek dalam sektor pertanian dan ekonomi secara keseluruhan. Harga komoditas pertanian langsung mempengaruhi pendapatan petani (Jandu *et al.*, 2024).

Tabel 1. 4 Harga Garam Kabupaten Sampang Tahun 2020-2023

No	Tahun	Harga Garam per (Kg) (Rp)		
		K1	K2	K3
1	2020	250	150	100
2	2021	500	450	400
3	2022	2700	2500	2300
4	2023	2000	1700	1300

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Sampang 2024

Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/5/2011 tanggal 5 Mei 2011 menetapkan bahwa harga penjualan garam di tingkat petani garam minimal Rp 750/kg (dari sebelumnya Rp 325/kg) untuk garam kualitas I dan minimal Rp550/kg (dari sebelumnya Rp 250/kg) untuk garam kualitas II (Baihaki, 2013). Harga garam di Pangarengan bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, volume produksi, importasi dan ketersediaan stok. Impor garam ke Indonesia yang tidak seimbang dengan kebutuhan dan produksi garam domestik diduga dapat mempengaruhi harga garam domestik. Ketidakstabilan harga ini menciptakan ketidakpastian bagi para petani garam (Safrida, 2021). Harga garam di Kabupaten Sampang per September 2024, walaupun cuaca bagus akan tetapi harga sangat murah dan itu tidak sesuai dengan biaya produksi. Harga garam berkisar

dari Rp400 hingga Rp800 per kilogram (Tahiruddin, 2024). Berdasarkan hasil temuan penelitian (Ghozali & Samputra, 2022) kebijakan impor garam menghasilkan dampak kontradiktif. Meskipun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasional, kebijakan ini justru menyebabkan kesejahteraan petani garam menurun, harga garam rakyat merosot, dan petani kesulitan memperoleh modal untuk produksi.

Begitupun menurut penelitian Ihsanudin dan Fauziyah (2014) struktur pasar yang kurang berpihak pada petani garam selaku aktor, berpengaruh terhadap harga yang diterima, sehingga berdampak pada pendapatan petani garam rakyat termasuk Madura. Iklim dan cuaca acapkali tidak bersahabat, mekanisme harga serta pasar garam cenderung tidak berpihak pada petani garam rakyat menjadikan usaha garam ini dilingkupi risiko (Ihsannudin, 2012). Bertahun-tahun berturut-turut harga yang buruk atau tidak stabil dan cuaca yang merusak digabungkan untuk menimbulkan banyak tantangan bagi petani garam (Helmi & Sasaoka, 2018).

Ketidakberdayaan atas intervensi pihak lain terhadap petani garam merupakan potret lemahnya posisi petani garam (Dzulkarnain *et al.*, 2020). Adanya monopoli dari beberapa pihak yang mengambil kebebasan pasar petani dan terlebih lagi adanya faktor-faktor lain yang mengakibatkan turunnya harga garam (Alfaroby & Haryadi, 2024). Lebih lanjut, dampak importasi garam untuk kebutuhan nasional juga menambah permasalahan baru, yang menyebabkan komoditas garam rakyat tidak dapat bersaing. Selaras dengan penelitian Febrizki & luthfi (2022) meski petani garam selama ini sebagai produsen akan tetapi tidak pernah menentukan harga jual.

Importasi garam memberikan persaingan bisnis yang cukup meresahkan bagi para petani. Hal ini mengakibatkan panen garam musim kemarau tidak terserap optimal dan harga garam anjlok (Asmiana *et al.*, 2022). Khawatirnya, turunnya harga jual garam

domestik dapat mengurangi minat petani garam untuk melanjutkan usaha mereka dalam komoditas ini (Safrida, 2021). Maka dari itu, petani garam rakyat harus mempersiapkan diri mereka dari segala keadaan yang menghambat produktivitas mereka dalam menghasilkan komoditas garam. Meskipun peristiwa ketidakpastian belum didokumentasikan dengan baik, masyarakat yang bergantung pada sumber daya seperti produsen garam adalah yang paling rentan terhadap dampak fenomena ini. Mengingat kurangnya sumber daya dan akses ke teknologi dan keuangan, produsen garam skala kecil memiliki kapasitas terbatas untuk mengembangkan strategi adaptasi untuk mengurangi kerentanan mereka terhadap peristiwa ketidakpastian (Mehar *et al.*, 2016). Yumna, (2025) menyebutkan sebagai salah satu bagian dari profesi nasib petani sering kali diakitkan dengan sisi ekonomi yang dimana dihadapkan dengan persoalan harga, nilai tukar, modal, subsidi, pendapatan, keuntungan dan kerugian.

Resilensi yang diaplikasikan menyesuaikan dengan keterampilan dan keputusan masing-masing petani garam yang merupakan aktor utama keberlanjutan budidaya garam (Febrizki & Luthfi, 2022). Ketahanan mata pencaharian menempatkan orang di pusat analisis dan menekankan kesejahteraan mereka. Ini sangat difokuskan pada sumber daya manusia mata pencaharian (Perrin *et al.*, 2020). Herman *et al.*, (2018) dalam (Rathi, 2022) menjelaskan, ketahanan ketika dipelajari dalam konteks pertanian. Dalam ketahanan pertanian, praktik yang terbatas pada petani dan pertanian menginformasikan cara mereka mengatasi dan beradaptasi dengan tantangan lingkungan dan sosial-ekonomi.

Terdapat tiga indikator utama dalam memahami konsep resiliensi, yaitu kapasitas penyangga (*buffer capacity*), kemampuan organisasi diri (*selforganisation*), dan kapasitas belajar (*capacity for learning*) (Speranza *et al.*, 2014). Menurut Husinsyah

(2014) dalam (Riyono & Juliansyah, 2018), pendidikan membuat cara berpikir lebih baik (rasional) terhadap apa yang dilakukan dan mampu mengambil keputusan atas berbagai alternatif yang dihadapi. Amalia et al., 2015; Sembiring dan Dharmawan, 2014 dalam Marseva et al., (2016) menerangkan, faktor yang memengaruhi resiliensi rumah tangga petani yaitu, jenis kelamin kepala rumah tangga, tingkat modal finansial, jumlah anggota rumah tangga, pendapatan rumah tangga, tingkat kepercayaan pada jaringan, dan tingkat penguasaan aset. Lebih lanjut, maka dalam penelitian ini untuk menganalisis keputusan rasional petani untuk tetap bertahan di pekerjaannya yaitu dengan; tingkat modal, luas lahan yang dikerjakan, status kepemilikan lahan, tingkat pendidikan petani, harga, dan tradisi budaya (pekerjaan turun temurun).

Mata pencaharian pedesaan adalah sistem masyarakat pedesaan yang mendapatkan standar hidup, apakah mata pencaharian mereka aman atau berisiko dari waktu ke waktu (Habib et al., 2023). M. Kikuchi dan Hayami (1987) dalam (Amaludin, 2018) menerangkan, Ketika sumber mata pencaharian tidak dapat lagi diharapkan pada sektor pertanian, maka mendiversifikasi mata pencaharian merupakan salah satu siasat yang dapat dilakukan oleh rumah tangga desa, utamanya bagi rumah tangga miskin desa. Mendiversifikasi sumber mata pencaharian dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu dengan beralih pada kegiatan ekonomi non-pertanian.

Petani memiliki rasionalitas, setiap tindakan dilakukan berdasarkan rasionalitas dengan memperhitungkan akibat dari tindakan yang dilakukan. Petani berusaha memperkecil atau menghindari akibat buruk dari tindakan yang dilakukan. Dalam praktiknya, petani memiliki kemampuan untuk menilai rasionalitas perilaku, dan kemampuan ini akan membentuk mekanisme "*Reasoned Scrutiny*" dalam proses seleksi yang berulang (Zhou & Fang, 2017). Tanner et al (2015:23) dalam (Perrin et al., 2020)

menjelaskan ketahanan mata pencaharian dapat didefinisikan sebagai "kapasitas semua orang lintas generasi untuk mempertahankan dan meningkatkan peluang mata pencaharian dan kesejahteraan mereka meskipun ada gangguan lingkungan, ekonomi, sosial dan politik".

Penduduk pedesaan telah mengalami pergeseran dari rumah tangga petani menjadi rumah tangga paruh waktu, dan bahkan menjadi rumah tangga non-pertanian. Di sisi lain, banyak penduduk desa yang menghadapi kerentanan mata pencaharian yang tinggi dan daya tahan terhadap risiko yang rendah di wilayah tersebut. Ketahanan mata pencaharian yang berkualitas dan efisien sangat penting bagi penduduk desa untuk mengurangi kerentanan terhadap risiko dan meningkatkan ketahanan mereka (Zhou *et al.*, 2021).

Petani garam sebagai aktor utama dalam kepastian ketahanan usaha pertanian garam juga kesejahteraan sosial rumah tangganya (Aldi *et al.*, 2021). Sinonim yang digunakan petani untuk mendefinisikan ketahanan pertanian sebagai kemampuan untuk melanjutkan ketika menghadapi gangguan sesuai dengan literatur tentang ketahanan pertanian (Perrin *et al.*, 2020). Kebertahanan pada dasarnya adalah kapasitas untuk melanjutkan usaha seperti biasa. Pendorong jangka panjang yang menghasilkan respons yang kuat didominasi oleh faktor sosial dan ekonomi, dengan contoh yang diamati di semua sistem pertanian (Nicholas-Davies *et al.*, 2021).

Maka dari pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas petani garam rakyat dalam mempertahankan pekerjaannya. Sehingga judul dari penelitian ini adalah **“RASIONALITAS PETANI GARAM RAKYAT TETAP BERTAHAN (STUDI DI DESA PANGARENGAN)”**. Dalam penyusunan penelitian ini terdapat beberapa variabel yang digunakan, yaitu modal, luas lahan, status kepemilikan

lahan, tingkat pendidikan, harga, dan tradisi budaya terhadap keputusan rasional bertahan sebagai petani garam rakyat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peluang variabel modal, luas lahan, status kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, harga, dan tradisi budaya terhadap keputusan rasional petani untuk tetap bertahan pada profesi petani garam rakyat di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah variabel modal, luas lahan, status kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, harga, dan tradisi budaya berpeluang terhadap keputusan rasional tetap bertahan sebagai petani garam rakyat di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang berkaitan dengan perilaku sosial ekonomi terkhusus dalam konteks pertanian tradisional dan ketahanan ekonomi.
2. Manfaat Praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan pertimbangan serta upaya rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk merancang program yang mendukung petani garam rakyat